



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

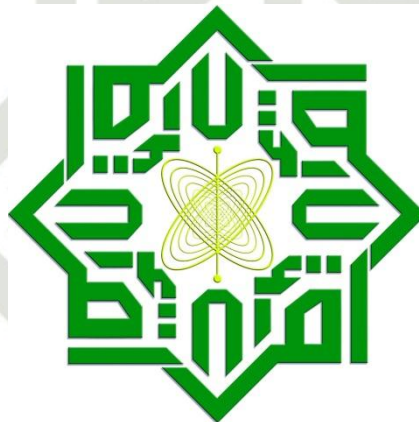
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ANALISIS AKUNTANSI ASET TETAP BERWUJUD PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

TUGAS AKHIR

*Disusun sebagai Salah-satu Syarat Menyelesaikan
Tugas-tugas Akademik dan Memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md)*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

YOGA HARDIANTA
NIM. 01674101885

**JURUSAN DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2020



LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

NAMA
NIM
PROGRAM STUDI
FAKULTAS
JUDUL

: YOGA HARDIANTA

: 01674101885

: DIPLOMA III AKUNTANSI

: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

: ANALISIS AKUNTANSI ASET TETAP BERWUJUD PADA
KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

Pekanbaru, 11 Desember 2020

Disetujui
Pembimbing

Identiti, SE., M.Ak., Ak. CA.

NIP.19690623 200901 2 004

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Ketua Program Studi,
D-III Akuntansi

Dr. Drs. H. Muh. Sid HM. M.Ag. MM.
NIP. 19620512 198903 1 003

Faiza Muklis. SE. M.Si. AK.
NIP. 19741108 200003 2 004



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA

: YOGA HARDIANTA

NIM

: 01674101885

PROGRAM STUDI

: DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS

: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

JUDUL

: **ANALISIS AKUNTASI ASET TETAP BERWUJUD PADA
KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU**


HARI/TANGGAL

: JUM'AT, 11 DESEMBER 2020

DISAHKAN OLEH

TIM PENGUJI

KETUA PENGUJI


Dr. Donny Martias, S.E., MM.
NIP. 19760306 200710 1 004

PENGUJI I


Febri Rahmi, S.E., M.Sc.Ak.CA.
NIP. 19720209 200604 2 002

PENGUJI II


Jasmira Syafii, S.E., M.Ak.AK.
NIP. 19750307 200701 2 019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS AKUNTANSI ASET TETAP BERWUJUD PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

Oleh :

YOGA HARDIANTA
NIM. 01674101885

Penelitian ini dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru yang di fokuskan terhadap Analisis Akuntansi Aset Tetap Berwujud. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi aset tetap berwujud pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tersebut telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku yaitu PSAP No. 07 tahun 2012 tentang aset tetap. Penulis berupaya untuk memperoleh data-data yang terkait berupa: data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data-data yang diperoleh secara langsung dari ketua kantor mengenai pelaksanaan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan yang telah disusun oleh Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam bentuk yang sudah jadi berupa struktur organisasi dan daftar aset tetap serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap. Dari penelitian ini penulis mengemukakan hasil bahwa perlakuan akuntansi aset tetap pada Kantor Komisi Pemilihan Umum kota Pekanbaru sesuai dengan PSAP No. 07 tahun 2012 tentang aset tetap.

Kata Kunci: Analisis, Aset Tetap, PSAP No. 07

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, kesempatan dan kemampuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Analisis Akuntansi Aset Tetap Berwujud pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru”**.

Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kenistaan dan kebodohan ke alam yang penuh dengan kedamaian dan kebaikan yaitu Islam yang kita miliki seperti sekarang ini.

Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama proses menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis banyak sekali mendapatkan perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi, serta masukan-masukan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda Edi Harman dan Ibunda Sukarti tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, do’a, motivasi, dan dorongan kepada penulis serta selalu menjadi motivasi utama dalam hidup. Tidak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada adik-adik tersayang MD Alfachrozie, Aidyil Ocsa, Irfan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mohd Fauzi dan Hafis Mohd Farraz yang selalu memberi dukungan dalam menyelesaikan laporan akhir ini dan tidak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof, Dr. H. Imam Suyitno, M.Ag, selaku Plt.Rektor UIN Suska Riau beserta staf.
2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, beserta Pembantu Dekan I, II dan III.
3. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak, selaku Ketua Jurusan Program Studi D-III Akuntansi.
4. Ibu Febri Rahmi, SE., M.Sc., Ak, CA selaku sekretaris jurusan Program Studi D-III Akuntansi.
5. Ibu identiti, SE., M.Ak., Ak, CA selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan Tugas Akhir ini, yang senantiasa meluangkan waktu, ilmu, motivasi serta dorongan dan masukannya kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang senantiasa memberikan banyak Ilmu kepada penulis.
7. Pemimpin dan seluruh karyawan/I Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, yang senantiasa membantu kelancaran dalam penulisan Tugas Akhir ini dan memberikan bimbingan sehingga penulis dapat mengumpulkan data dengan baik dan benar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Sahabat seperjuangan kelas B angkatan 2016 Jurusan D-III Akuntansi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Sebagai insan yang memiliki keterbatasan serta kekurangan, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan dan penulisannya.

Untuk itu, penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan tugas akhir selanjutnya. Namun penulis tetap sangat berharap bahwa tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, Juli 2020

YOGA HARDIANTA
NIM. 01674101885

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Teknik Pengumpulan Data	8
G. Metode Analisis Data	8
H. Sistematika Penelitian	9
 BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Struktur Organisasi di Kantor KPU Kota Pekanbaru	10
B. Sejarah Singkat Kantor KPU	11
C. Tugas dan Wewenang KPU	14
D. Visi dan Misi Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru	15
E. Aktivitas Kantor	16

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

A. Tinjauan Teori	20
1. Pengertian Akuntansi.....	20
2. Pengertian Aset Tetap.....	21
3. Klasifikasi Aset Tetap	25
4. Cara Perolehan Aktiva Tetap.....	27
5. Pengeluaran Setelah Perolehan Aktiva Tetap.....	31
6. Penyusutan Aktiva Tetap.....	32
7. Penghapusan Aktiva Tetap	37
8. Penyajian Aktiva Tetap dalam Laporan Keuangan	41
9. Aktiva Tetap Menurut Konsep Islam	41
B. Tinjauan Praktek.....	44
1. Klasifikasi Aset Tetap	44
2. Perolehan dan Pencatatan Aset Tetap.....	45
3. Pengeluaran Setelah Masa Perolehan Aset Tetap.....	47
4. Penyusutan Aset Tetap	47
5. Penghapusan dan Pelepasan Aset Tetap.....	49
6. Penyajian Aset Tetap Dalam Laporan Keuangan.....	50

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA	54
----------------------	----

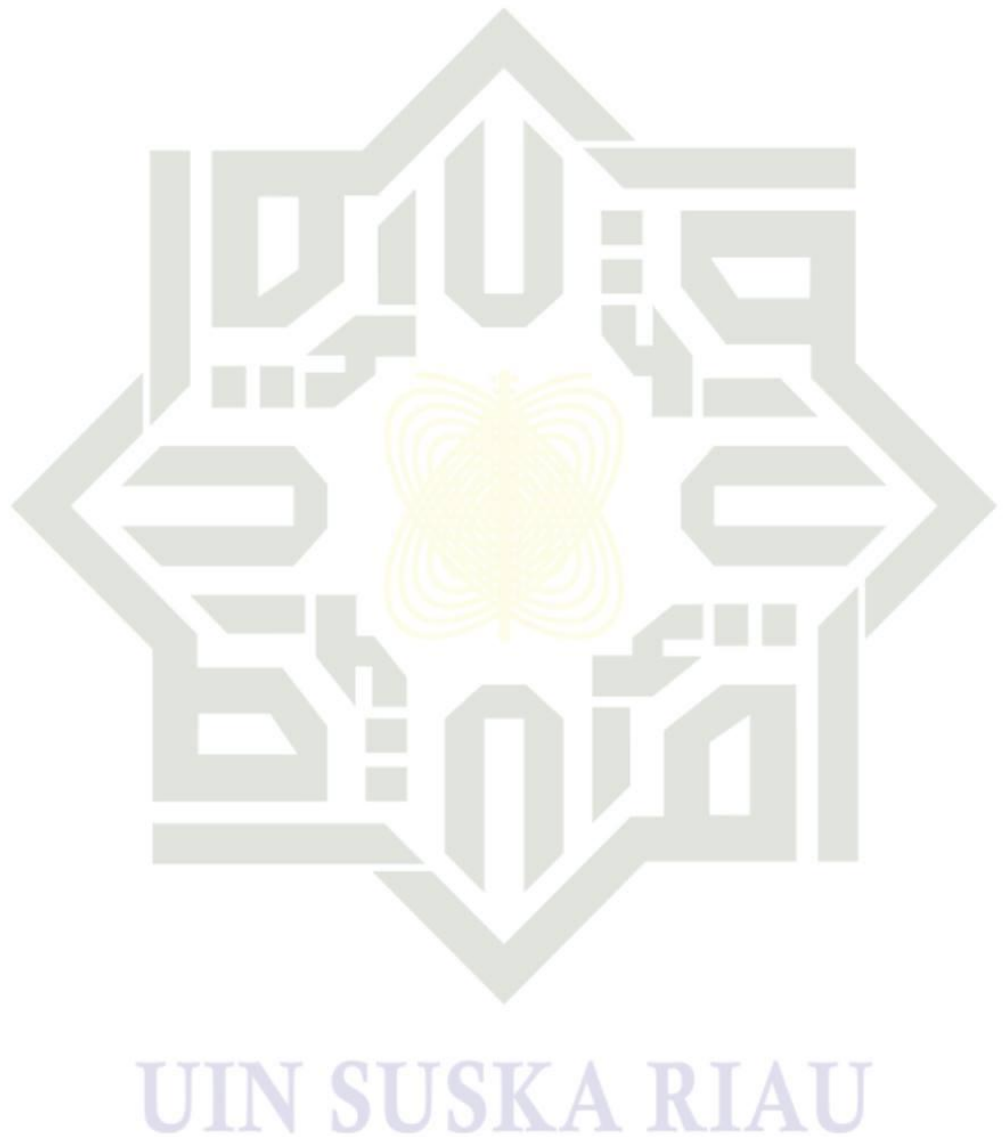
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Tabel. 2.1 Struktur Organisasi Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.....	10
--	----





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Data Pegawai Kantor Komisi Pemilihan Umum Pekanbaru 2019.....	9
Tabel 3.1	Metode Penyusutan Jumlah Angka.....	36
Tabel 3.2	Metode Penyusutan Saldo Menurun Ganda.....	37
Tabel 3.3	Metode Penyusutan Jam Jasa.....	38
Tabel 3.4	Metode Penyusutan Unit Produksi.....	39
Tabel 3.5	Daftar aset tetap Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.....	44
Tabel 3.6	Penyajian neraca Kantor Komisi pemilihan Umum Kota Pekanbaru.....	50

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan kehidupan dan memiliki wilayah yang lebih luas serta lebih kompleks dari pada sektor swasta atau privat. Akuntansi sektor publik di definisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang di harapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan apartemen-apartemen di bawahnya, pemerintahan daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta.

Dewasa ini, organisasi dituntut lebih ekonomis, efisien, dan efektif. Tuntutan-tuntutan tersebut menyebabkan organisasi sektor publik berusaha mengembangkan akuntansi sektor publik dalam rangka menciptakan good governance ini meliputi transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Pelayanan masyarakat oleh sektor publik secara keseluruhan memainkan peranan yang vital dalam perekonomian negara. Pemerintahan pusat maupun daerah cenderung berfokus pada pengeluaran nasional dan memproyeksikan sektor publik sebagai “kran ekonomi yang menyerap sumber daya dapat digunakan lebih baik di sektor lain.

Akuntansi sektor publik ini terdiri dari beberapa elemen, yaitu: perencanaan publik, penganggaran publik, realisasi anggaran publik, pengadaan barang dan jasa publik, pelaporan keuangan sektor publik, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

audit sektor publik. Akuntansi dalam instansi sektor pemerintahan sangatlah dibutuhkan. Sebagaimana pengertian akuntansi itu sendiri adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan/instansi. Kondisi pertumbuhan dan perkembangan perusahaan/instansi merupakan prioritas dan tujuan utama yang harus dilakukan oleh suatu organisasi.

Dalam sektor perekonomian, teknologi yang semakin maju mempengaruhi perkembangan suatu perusahaan/instansi, baik perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah. Setiap organisasi memiliki sasaran yang akan dicapai dalam hal kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan organisasinya. Perusahaan tidak akan dapat mencapai sasaran tersebut tanpa adanya aset yang dapat menjamin kelancaran operasional rutin perusahaan, terutama aset tetap. Aset tetap dalam PSAP 07 paragraf 5, di definisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Ikatan Akuntan Indonesia dalam buku standar Akuntansi Keuangan (2009:16.2), menjelaskan bahwa yang di maksudkan dengan aset tetap adalah aset berwujud yang:

- a. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau persediaan barang atau jasa untuk di sewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif.
- b. Diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aset tetap mempunyai kedudukan yang penting dalam perusahaan dikarenakan jumlahnya yang begitu banyak dan memerlukan dana dalam jumlah yang besar serta tertanam dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu di perlukan perlakuan akuntansi yang baik dalam menangani aset tersebut. Dalam perlakuan akuntansi aset tetap ini akan di bahas mengenai klasifikasi aset tetap, perolehan dan pencatatan aset tetap penyusutan aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan.

Aset tetap dibedakan menjadi 2 yaitu aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Aset tetap berwujud merupakan aset yang dapat terlihat oleh panca indera yang bersifat relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan/instansi dalam jangka waktu yang cukup lama. Aset tetap berwujud misalnya: tanah, bangunan, peralatan dan mesin, dan aset tetap lainnya. Sedangkan untuk aset tidak berwujud meliputi: hak paten, hak cipta, *goodwill*, merek dagang, dan franchise.

Titik utama dalam pengakuan aset tetap adalah ketika manfaat keekonomian dan biaya perolehan sudah tersedia. Adapun pengukuran aset tetap itu di dapat melalui dua cara, yaitu dengan menggunakan biaya perolehan pada saat perolehan. Setelah aset tetap di peroleh, kemudian akan digunakan dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan atau instansi. Dalam pemanfaatan aset tetap untuk menjalankan kegiatan operasional instansi, tentu saja akan terjadi pengeluaran yang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: pengeluaran untuk pemeliharaan aset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetap dan pengeluaran yang bersifat untuk memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat keekonomian di masa yang akan datang.

Perlakuan atas aset tetap berwujud perlu mendapat perhatian yang serius dan benar, karena kesalahan dalam pengelolaan dan pemakaian dapat menyebabkan perusahaan/instansi tidak dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan/instansi tidaklah sedikit jumlahnya, oleh karena itu diperlukan pertimbangan dan kehati-hatian dalam memperlakukan aset tetap tersebut dan perlu direncanakan dengan baik dimulai saat aset tersebut diperoleh sampai aset tersebut diberhentikan termasuk juga dalam penyajian aset tetap di neraca yang harus disesuaikan dengan apa yang telah ditetapkan oleh standar akuntansi yang diterima umum.

Semua perlakuan akuntansi aset tetap tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap laporan keuangan sebuah perusahaan/instansi. Seperti yang telah diketahui, laporan keuangan tersebut sangat diperlukan untuk mengambil keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi terhadap aset tetap tersebut sangatlah penting.

Kantor Komisi Pemilihan Umum kota Pekanbaru adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan pelaksanaan dalam Pemilihan Umum. ini tentunya memiliki aset tetap yang membantu dalam kegiatan operasionalnya dalam melaksanakan pesta demokrasi untuk masyarakat. Untuk itu perlunya dilakukan suatu perlakuan akuntansi yang baik dimulai dari pengelompokan aset tetap, cara perolehan aset tetap biaya setelah masa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perolehan aset tetap, perhitungan penyusutan aset tetap tersebut sampai dengan pengapusannya serta penyajian aset tetap dalam laporan keuangan instansi.

Dalam perolehan aset tetap, Kantor Komisi Pemilihan Umum kota Pekanbaru memperoleh aset tetap melalui pembelian tunai dari pihak ketiga berdasarkan dana yang telah ditetapkan oleh kementerian keuangan republik Indonesia. Adapun aset tetap yang dimiliki oleh Kantor Komisi Pemilihan Umum kota Pekanbaru adalah, peralatan dan mesin.

Dalam pengoperasiannya Kantor Komisi Pemilihan Umum kota Pekanbaru juga akan mengeluarkan biaya untuk perawatan dan pemeliharaan yang juga telah dianggarkan sebelumnya. Aset tetap baik di perusahaan ataupun di instansi pemerintah pasti akan mengalami penyusutan. Penyusutan umumnya terjadi ketika aset tetap telah digunakan dan merupakan beban bagi periode dimana aset dimanfaatkan.

Selama pengoperasiannya, aset tetap mengalami kerusakan atau tidak dapat memberikan jasa akan di hapuskan dari daftar aset tetap. Adapun penghapusan aset tetap pada kantor Komisi Pemilihan Umum kota Pekanbaru dilakukan dengan mengajukan pengusulan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau untuk melakukan penghapusan aset tetap sehingga dapat pelaporannya aset tetap dalam neraca bisa dihapuskan. Pada penyajian aset tetap dalam neraca, kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru telah melaporkan aset tetap dengan menyajikan klasifikasi aset tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai aset tetap pada Kantor Komisi Pemilihan III Umum kota Pekanbaru dengan judul: **"Analisis Akuntansi Aset Tetap Berwujud Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru"**.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun masalah yang akan dibahas dalam Tugas Akhir mengenai perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ini adalah: “Apakah perlakuan Akuntansi Aset Tetap berwujud tersebut telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi aset tetap berwujud pada Kantor Komisi Pemilihan Umum kota Pekanbaru tersebut telah dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berlaku?

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengalaman penulis mengenai perlakuan akuntansi aset tetap terutama perlakuan akuntansi aset tetap pada instansi pemerintahan.
- 2) Bagi Perusahaan/instansi KPU Kota Pekanbaru, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki kekurangan yang mungkin ada di dalam perusahaan/instansi mengenai akuntansi aset tetap.
- 3) Sebagai bahan informasi bagi penulis lainnya yang ingin membahas masalah ini di masa mendatang.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi penelitian dan waktu penelitian.

Penulis melakukan penelitian ini di Kantor KPU Kota Pekanbaru yang beralamat di JL. Arifin Ahmad No.39, Tangkerang Barat, Kec. Marpoyan Damai di laksanakan pada bulan November sampai dengan Desember 2019 di kantor KPU Kota Pekanbaru.

1.4.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut,

- 1) Data primer, ialah data yang di peroleh langsung dari objek penelitian yaitu pada Kantor KPU Kota Pekanbaru dimana peneliti peroleh melalui hasil dari wawancara.
- 2) Data sekunder, merupakan data yang sudah ada di dalam instansi tersebut menegani sejarah berdirinya perusahaan, dokumen,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

catatan, neraca, data aset tetap, serta struktur organisasi perusahaan

1.5 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa cara dalam mengumpulkan data, yaitu:

- 1.5.1 Wawancara, melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait yang dianggap bisa memberikan keterangan yang dibutuhkan penulis.
- 1.5.2 Observasi, melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yaitu dokumen, catatan, prosedur, fungsi yang terkait serta sistem pengendalian internal dalam sistem akuntansi penggajian
- 1.5.3 Perpustakaan, sehubungan dengan teori-teori yang di perlukan penulis dalam penelitian ini maka penulis membutuhkan sumber teori dari berbagai buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6 Metode Analisis Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif komparatif (perbandingan), dengan metode ini dimana membandingkan antara teori-teori yang mendukung baik itu dari para ahli ekonomi dan akuntansi yang berhubungan dengan pembahasan tersebut, sehingga dengan praktek yang terjadi di lapangan dapat di ambil suatu kesimpulan serta saran-sarannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.7 Sistematika penulisan

Secara garis besar, pembahasan dalam tugas akhir ini dibagi menjadi empat (4) bab. Pada setiap bab di rincikan dalam beberapa sub bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Menjelaskan sejarah singkat instansi, struktur organisasi instansi, visi dan misi instansi, logo instansi, fungsi dan tujuan instansi serta aktifitas instansi.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

Tinjauan teori dan praktik berisi penjelasan teori-teori tentang: (Pengertian aset tetap, Klasifikasi aset tetap, cara Perolehan Aset Tetap, Pengeluaran setelah Perolehan Aktiva Tetap, Penyusutan Aktiva Tetap, Penghapusan Aktiva Tetap, Penyajian Aktiva Tetap dalam Laporan Keuangan) yang digunakan dan pembahasan masalah praktik serta analisis data.

BAB IV : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang nantinya berguna dalam bagi instansi dan pihak lain yang berkepentingan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

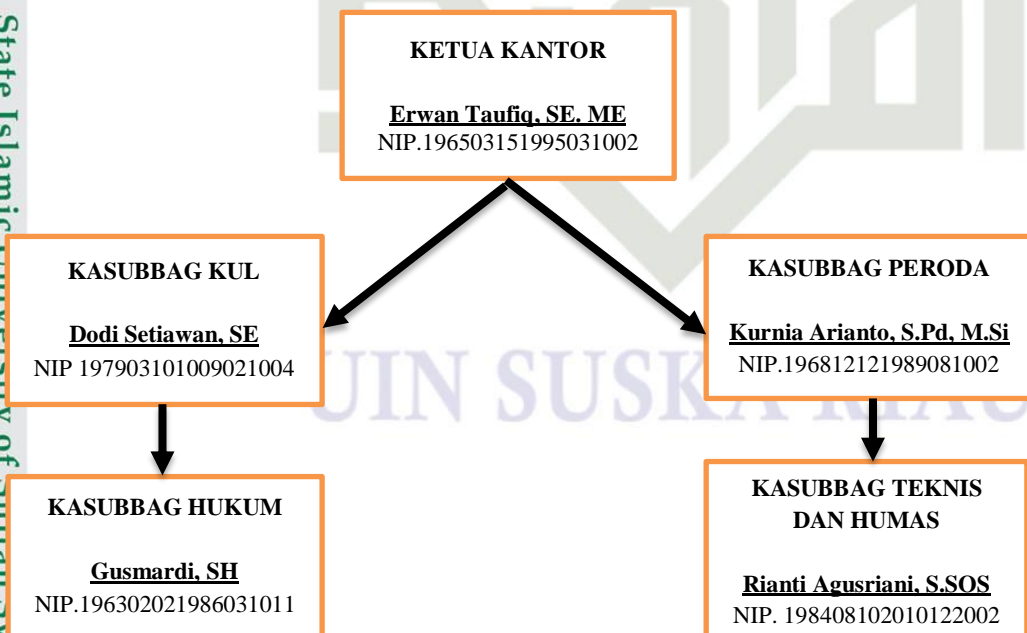
BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Struktur Organisasi di Kantor KPU Kota Pekanbaru

Struktur organisasi merupakan suatu bagian dan uraian tugas yang menggambarkan hubungan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap karyawan yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, maka seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan oleh Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru. Dilihat dari organisasi, maka wewenang tertinggi dalam Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru berada pada Kepala Kantor merupakan pimpinan utama yang dibantu oleh para Kepala Seksi dan bagian-bagiannya.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru



Sumber: Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, Tahun 2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Sejarah Singkat Kantor KPU

Pemilihan umum (Pemilu) pertama di Indonesia diselenggarakan pada 1955. Meski demikian, sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan Pemilu sudah dimulai sejak 1946. Ketika Presiden pertama di Indonesia, Soekarno, membentuk Badan Pembentuk Susunan Komite Nasional Pusat dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat.

Panitia Pemilihan Indonesia. Setelah revolusi kemerdekaan pada 7 November 1953, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden No. 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Panitia Pemilihan Indonesia bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian Presiden Soekarno mengesahkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada 4 April 1953 dan menyebutkan PPI berkedudukan di ibu kota negara. Tetapi Pemilu pertama tersebut tidak dilanjutkan dengan Pemilu kedua. Meski pada 1958 Presiden Soekarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II.

Lembaga Pemilihan Umum Pada masa pemerintahan orde baru, Presiden Soeharto membentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang bertugas sebagai badan penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. LPU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970. Bertindak sebagai ketua LPU adalah Menteri Dalam Negeri dengan keanggotaan yang terdiri atas Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Sekretariat Umum LPU dan Badan Perbekalan dan Perhubungan.

Pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998 mengakhiri periode orde baru. Kemudian jabatan kepresidenan digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ Habibie).

Setelah presiden soeharto di lengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998 jabatan presiden di gantikan oleh wakil preisdan di gantiakan oleh wakil presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan publik, pemilu yang baru akan di percepat segera di dilaksanakan,sehingga hasil-hasil pemilu 1997 segera di ganti. Kemudian ternyata pemilu di adakan bahwa pemilu dilaksanakan pada 7 juni 1999 segera di ganti,atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie.

Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakan pemilu adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk pemilu 1997 sudah dia nggap tidak di percaya. Hal ini kemudian di lanjutkan dengan penyelenggaraan sidng umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru sebelum menyelenggarakan pemilu yang di percepat itu, pemerintah mengajukan RUU tentang pemilu dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DPR dan DPRD. Ketiga draft UU ini disiapkan oleh sebuah tim Depdagri, yang disebut Tim 7, yang diketuai oleh Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid (Rektor IIP Depdagri, Jakarta).

Setelah RUU disetujui DPR dan disahkan menjadi UU, presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya adalah wakil dari partai politik dan wakil dari pemerintah. Satu hal yang secara sangat menonjol membedakan Pemilu 1999 dengan Pemilu-pemilu sebelumnya sejak 1971 adalah Pemilu 1999 ini diikuti oleh banyak sekali peserta. Ini dimungkinkan karena adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Peserta Pemilu kali ini adalah 48 partai. Ini sudah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah partai yang ada dan terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM, yakni 141 partai.

Dalam sejarah Indonesia tercatat, bahwa setelah pemerintahan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, pemerintahan Reformasi inilah yang mampu menyelenggarakan pemilu lebih cepat setelah proses alih kekuasaan. Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan pemilu hanya sebulan setelah menjadi Perdana Menteri menggantikan Ali Sastroamidjojo, meski persiapan-persiapannya sudah dijalankan juga oleh pemerintahan sebelum-nya. Habibie menyelenggarakan pemilu setelah 13 bulan sejak ia naik ke kekuasaan, meski persoalan yang dihadapi Indonesia bukan hanya krisis politik, tetapi yang lebih parah adalah krisis ekonomi, sosial dan penegakan hukum serta tekanan internasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Asas kerakyatan mengandung arti bahwa kedaulatan ada pada rakyat. Segala hukum (peraturan perundang-undangan) haruslah bersandar pada perasaan. Keadilan dan kebenaran yang hidup dalam hati rakyat banyak, dan aturan penghidupan haruslah sempurna dan berbahagia bagi rakyat kalau ia beralasan kedaulatan rakyat.”

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru berada di Jln. Arifin Ahmad, dimana tempat yang saat ini adalah amanah dari walikota pekanbaru untuk di tempati oleh beberapa kantor, yaitu: Kesbangpol, Kantor Koni, Kantor Pariwisata, dan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.

2.3 Tugas dan Wewenang KPU

Menurut Pasal 10 UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keppres No. 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilu.
2. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilu.
3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilu mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II.
6. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum.
7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 juga ditambahkan, selain tugas dan kewenangan KPU tersebut, KPU berwenang melakukan mengevaluasi sistem Pemilu. Evaluasi dilakukan selambat-lambatnya 3 tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan.

2.4 Visi dan Misi Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru

1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru

Terwujudnya komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi indonesia yang berkualitas berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Indonesia.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru

Membangun lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

2.5 Aktivitas Kantor

1. Kepala Kantor

- a. Mengkordinasikan penyusunan rencana kerja Kantor Komisi Pemilihan Umum sebagai bahan penyusunan rencana strategis kantor wilayah.
- b. Mengkordinasikan penyusunan rencana pengamanan penerimaan data caleg berdasarkan berkas yang di terima dari masing2 bacaleg, pengarahan dan perbaikan dari data yang akan di terima anggota pokja di KPU.

2. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha kearsipan, persidangan, protokol, rumah tangga, dan keamanan di lingkungan KPU.

Dalam melakukan tugas, subbagab umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan urusan tata usaha dan kearsipan.
- b. Pengelolaan urusan persidangan dan protokol.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengelolaan urusan keamanan.
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga.
- e. Penyusunan pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan sarana pemilu.
- f. Penyusunan alokasi barang.
- g. Pelaksanaan pengadaan barang kebutuhan pemilu.
- h. Penyimpanan dan pemeliharaan barang kebutuhan pemilu.
- i. Penyaluran dan pendistribusian barang kebutuhan pemilu.
- j. Pemeliharaan dan inventarisasi sarana dan prasarana pemilu, dan.
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha.

3. Sub Bagian Program dan Data

Mempunyai tugas menyusun rencana, program, anggaran, kerjasama antar lembaga-lembaga, penelitian dan pengembangan, pengelolaan data dan informasi, serta monitoring dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas subbag PERODA menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- b. Pelaksanaan kerjasama antar lembaga, penelitian dan pengembangan organisasi dan sistem pemilu.
- c. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan,
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan data
- f.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sub Bagian Hukum

Mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, pengkajian, administrasi hukum peserta pemilu, dokumentasi dan informasi hukum serta ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugas bagian hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU.
- b. Pengkajian peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian advokasi dan penyelesaian sengketa hukum.
- d. Pelaksanaan administrasi hukum peserta pemilu.

5. Sub Bagian Teknis Pemilu dan HUMAS

Subbag teknis dan humas mempunyai tugas menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis, serta bimbingan teknis, dan survival dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pergantian anatar waktu anggota DPR, DPD, dan DPRD dan pengisian anggota DPRD pasca pemilu daerah pemekaran, publikasi dan sosialisasi informasi pemilu serta pasrtisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

Tugas Subbagian Teknis dan HUMAS:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penyiapan pedoman dan petunjuk teknis, serta bimbingan teknis, dan supervisi dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- b. Penyiapan pedoman dan petunjuk teknis, serta bimbingan teknis, supervisi, verifikasi, dan administrasi penggantian antar waktu dan pengisian DPRD pasca pemilu di daerah pemekaran.
- c. Penyiapan publikasi dan sosialisasi informasi pemilu.
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga subbagian.

Tabel 2.1 Data Pegawai Kantor Komisi Pemilihan Umum Pekanbaru Tahun 2019

No.	Keterangan	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Kantor	1
2.	Sub Bagian Umum, Keuangan, dan logistik	13
3.	Sub Bagian Program dan Data	5
4.	Sub bagian hukum	4
5.	Sub bagian teknis pemilu dan humas	11
Jumlah		34

Sumber: Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, Tahun 2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berwujud pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru memiliki Aset Tetap yang membantu dalam kegiatan operasional. Adapun klasifikasi aset tetap yang ada di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru pada tahun 2019 terdiri dari Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya.

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru memperoleh aset tetap dengan pembelian tunai dari pihak ketiga dari dana kementerian keuangan. Dalam pembelian tunai harga perolehan dicatat seharga faktur dan ditambah dengan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan aset tetap tersebut dipergunakan.

Perhitungan penyusutan aset tetap pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dilakukan oleh pihak kantor, karena pihak kantor memiliki kewenangan dalam menilai penyusutan aset tetap. Selama tahun 2019 Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru belum pernah melakukan pencatatan dalam penghapusan dan pelepasan aset tetap karena kondisi dari aset tetap yang masih baik dan masih layak digunakan.

Jika ada aset tetap yang tidak layak digunakan lagi serta tidak dapat memberikan jasa dalam kegiatan operasional, maka pihak kantor akan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengajukan usulan penghapusan aset tetap bersangkutan ke BPK sehingga aset tetap tersebut dapat dihapuskan pada daftar aset tetap di laporan posisi keuangan milik pihak kantor.

4.2 Saran

Dari beberapa kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang semoga dapat digunakan oleh Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru sebagai bahan pertimbangan dalam perlakuan terhadap aset tetapnya. Saran tersebut sebagai berikut:

1. Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru harus lebih cermat dalam melakukan penerapan akuntansi aktiva tetap di masa yang akan datang agar laporan keuangan yang dihasilkan lebih informatif.
2. Sebaiknya senantiasa melakukan pelatihan dan pembimbingan karyawan terutama dibidang akuntansi agar memiliki pemahaman lebih mengenai akuntansi terutama pada perlakuan akuntansi aktiva tetap dan dapat menyusun laporan keuangan dengan rapi dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

- Bastian Indra. 2011. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Carl S. Warren, dkk. 2014. *Accounting Indonesia Adaptation*. Jakarta: Salemba Empat.
- Deadi Nordiawan, dkk. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- E. Kieso, dkk. 2011. *Intermediate Accounting*, Edisi 12. Jakarta: Erlangga.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. *Standar Akuntansi Pemerintah Entitas Tanpa Akuntabilitas publik (SAK ETAP)*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Indrianto, Nur, Supomo, Bambang. 2002. *Metodelogi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Keppres No. 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan
- Lantip Susilowati. 2015. *Standar Akuntansi Keuangan*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Radiano. 2006. *Akuntansi Koperasi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan keuangan*. Jakarta: PT. Gramedia idiasarana Indonesia.
- Soemarso. 2010. *Akuntansi: Suatu Pengantar, Cetakan Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
- Zaki Baridwan. 2012. *Sistem Akuntansi Pemerintahan*. Edisi Kelima. Yogyakarta: BPFE.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yoga Hardianta, seorang laki-laki yang dilahirkan pada tanggal 06 November 1997 di Pekanbaru dan bertempat tinggal di Desa Kotabaru Kecamatan Kritang Kabupaten Indragiri Hilir. Penulis menempuh pendidikan awal di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 005 Kotabaru. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda dan melanjutkan pendidikan tingkat atas di Madrasah Aliyah Tarbiyah Islamiyah Kotabaru, hingga akhirnya bisa menempuh pendidikan tinggi di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Jurusan DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Penulis aktif dalam kegiatan organisasi yaitu, Gerakan Pemuda Mengaji Subuh di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang sampai sekarang. Penulis menjabat sebagai anggota periode 2021-2022. Selain itu, penulis juga tergabung dalam kegiatan kemasyarakatan yaitu Himpunan Kegiatan Masyarakat Keritang dan menjabat sebagai Sekretaris Organisasi pada periode 2018-2020.

UIN SUSKA RIAU